

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Bamus Betawi Harus Legowo

Anggaran Dicoret oleh DPRD DKI

JAKARTA- Anggaran untuk Bamus Betawi sebesar Rp 6 miliar dalam APBD 2020 telah dicoret DPRD DKI Jakarta. Alasannya, anggaran itu sebelumnya tidak dibahas di komisi maupun di Badan Anggaran DPRD DKI saat pembahasan Rancangan APBD.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Abraham Lunggana mengaku legowo tak menerima anggaran dana hibah Bamus Betawi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2020.

"Saya pastikan, saya mengerti anggaran DKI sedang defisit. Saya bilang saya siap tidak menerima hibah tahun ini dan saya siap dengan uang saya dan teman-teman. Saya siapkan buat program Bamus Betawi tahun 2020 sebesar Rp 10 miliar," ujar pria yang akrab disapa Lulung itu di Balai Kota DKI, Kamis (26/12/2019).

Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, Bamus Betawi telah menyiapkan anggaran mandiri sebesar Rp 10 miliar. Anggaran tersebut untuk beberapa program yakni meluncurkan tabungan umrah untuk masyarakat dan Bamus Betawi, untuk festival palang pintu, festival kerak telur, hingga festival Kampung Betawi.

"Terus yang keenam dan seterusnya itu terus yah kita laksanakan. Jadi kita tidak pernah mau berhenti untuk menjalankan program sesuai perda Nomor 4 Tahun 2015 artinya di situ juga ada kelestarian Budaya Betawi," ungkap Lulung.

Dengan anggaran mandiri dari Bamus Betawi ini, sambung Lulung, akan tetap mendukung program gubernur. "Jadi saya akan mendukung program gubernur, dengan anggaran mandiri,

karena kita harus mandiri. Karena tim ekonomi saya sudah banyak buat program bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan," tambah Lulung.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta terlibat perdebatan alot dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait anggaran untuk Bamus Betawi. Anggaran sebesar Rp 6 miliar itu dimunculkan Pemprov DKI Jakarta saat adanya rapat pembahasan RAPBD yang merupakan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Komisi A Mujiyono mempertanyakan pengajuan anggaran yang terbilang mendadak. "Soal (anggaran) Bamus Betawi, kita bukan masalah setuju tidak setuju tapi benar enggak pengajuannya? Dilihat kemarin di MoU tidak ada," kata Mujiyono dalam rapat tersebut di ruang serbaguna, lantai 3 gedung DPRD DKI, Senin (23/12/2019).

Bahkan, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang merupakan pimpinan rapat juga menanyakan anggaran itu sempat dibahas di Komisi A atau tidak. "Tolong semua harus memikirkan sama-sama. Karena Bamus ini kan produk perda. Saya tanya Komisi A juga enggak tahu, jadi kita harus gimana," tanya dia.

Pria yang akrab disapa Pras itu menjelaskan, ia memang meminta pembahasan anggaran Bamus Betawi ditunda dalam rapat karena akan ke toilet. Ia kemudian lupa untuk membahas kembali hal itu. "Iya lupa dimasukkan, jadi dianggarkan lagi di APBD Perubahan," kata dia.

Sedangkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, alasan kemunculan anggaran Bamus Betawi itu. "Bamus sudah masuk sebelum KUA-PPAS. Lalu ada forum umat beragama, waktu itu Pak Ketua bilang tunda dulu karena ada dualisme (kepemimpinan Bamus Betawi). Lalu sekarang kami tanyakan lagi," tukas dia. (ib1)